DEMOKRASI DELIBERATIF POLITIK PEKERJA PERS (Komunikasi Ruang Publik Pekerja Media Massa di Kedai Kopi Perjoeangan Jakarta)

Oleh:

Radita Gora

**Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Satya Negara Indonesia**

ABSTRAK

Wartawan sebagai insan pelaku media harus mampu untuk melihat situasi politik secara objektif dengan mengacu pada nilai-nilai berita dan kode etik yang berlaku. Tak banyak diketahui bahwa wartawan sendiri juga ikut bermain di balik catur perpolitikan pemerintah. Sehingga dalam hal ini wartawan pun juga menjadi bagian dalam pelaksanaan perolehan kekuasaan oleh pihak tertentu karena faktor kesejahteraan yang tidak diperoleh para kelompok pekerja pers dan mencari jalan pintas. Melalui Ruang Publik Kedai Kopi Perjoeangan, menjadi wadah bagi pekerja pers di Jakarta dalam membentuk suatu pergerakan politik dalam menuntut kesejahteraan pekerja bagi industri media massa. Namun pada pergerakan dilihat sebagai pergerakan proletariat namun di satu sisi sendiri identik dengan perjuangan kelompok pekerja pers dalam menuntut hak profesionalitas sebagai jurnalis.

Abstract

Journalists as media actors must be able to objectively see the political situation by referring to the prevailing news values and ethical code. It is not known that journalists themselves also played behind government political chess. So in this case journalists also become part of the implementation of the acquisition of power by certain parties because of welfare factors that are not obtained by the press workers' groups and seek shortcuts. Through Kedai Kopi Perjoeangan Public Room, it is a place for press workers in Jakarta to form a political movement in demanding the welfare of workers for the mass media industry. But the movement is seen as a movement of the proletariat but on the one hand itself is identical with the struggle of the press workers' group in demanding the right of professionalism as a journalist.

I. Pendahuluan

Persoalan pekerja media bukan hanya ketidakobjektifan media dalam memuat konten - konten yang non objektif dan bersifat provokatif, namun persoalan pekerja media ini terkadang ada keterlibatan dalam berbagai aktivitas ataupun masuk dalam lingkup perpolitikan diluar kepentingan media dengan memihak pada salah satu pandangan politik tertentu. Seperti keterlibatan pada salah satu partai, ikut menjadi staff atau bagian tangan kanan dari salah satu tokoh politik serta ikut dalam mengatur startegi untuk memperoleh kekuasaan bagi partai atau tokoh politik tertentu. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kaidah dari pekerja media yang mengutamakan objektivitas dan pemenuhan etika dalam bekerja.

Tak jarang praktek suap di kalangan wartawan pun juga kerap terjadi. Banyak oknum wartawan seringkali memanfaatkan situasi untuk menjadikan sebuah kasus atau peristiwa sebagai 'ladang basah'. Praktek gelap macam ini sering tidak terdeteksi, kecuali apabila ada masyarakat

yang melaporkan tindakan tidak menyenangkan dari wartawan yang cenderung meresahkan narasumber. Seperti bentuk pemerasan yang dilakukan wartawan yang telah melakukan investigasi di lapangan dan cenderung membocorkan berita ataupun mem "pelintir" berita untuk menyudutkan narasumber. Berdasarkan praktek jurnalistik menyimpang ini yang kemudian dapat menjatuhkan nilai – nilai filosofis kebebasan pers itu sendiri.

Tidak jarang pekerja media yang sudah memiliki kedudukan tinggi di media massa baik sebagai koordinator peliputan sampai pada pimpinan redaksi, melalui nama dan kedudukan yang dimiliki mencoba memanfaatkan relasi (jaringan) politik yang dimilikinya untuk mencari 'ladang basah' dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari aktivitas perpolitikan diluar dari pekerjaannya sebagai profesi yang sebenarnya. Namun keadaan wartawan yang mampu membangun relasi politik di dalamnya, tak jarang juga dimanfaatkan oleh para petinggi media itu sendiri untuk memanfaatkan jaringan berita dan suplai dana untuk konten di media sehingga menjadi pemasukan bagi para pekerja media itu sendiri. Sehingga, dalam hal ini terjadi semacam krisis legitimasi bagi para pekerja pers dibawahnya atau staf yang bekerja di lapangan untuk mengabaikan perolehan data secara benar, namun menekankan perolehan data secara politis. Legitimasi yang berkembang bagi para pekerja adalah melibatkan diri sebagai joki politik di dalam ranah perpolitikan bagi pihak-pihak tertentu, sementara itu staf pers di lapangan juga harus ikut bermain dalam perolehan informasi secara tidak wajar serta menekankan pengambilan keuntungan bagi media massa itu sendiri, serta keuntungan para pemilik kuasa di media sementara pekerja di lapangan hanya mengikuti apa yang ditekankan oleh atasan serta narasumber yang dijadikan sebagai bahan berita dan pemberi keuntungan lebih.

Berdasarkan kasus yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya suatu konflik teoritis pekerja di lapangan atau staff wartawan di lapangan dalam menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan etika dan merasa telah menjadi bagian dari tekanan politis para petinggi media dalam memperoleh keuntungan sepihak. Para pekerja di lapangan pun seringkali merasa bahwa dirinya tidak memiliki sisi demokrasi dalam menentukan sikap untuk menyikapi realitas politik yang menjadi bagian dari pemberitaan yang diperolehnya.

Ketika berada di lapangan, para pekerja media terlihat seperti 'dibungkam' untuk tidak bisa mengungkapkan pendapat karena terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan petinggi media termasuk pemilik media dalam urusan politik diluar. Satu sisi pekerja pers sendiri juga dibalut pada tekanan kepentingan pekerjaan dan alienasi pekerja terhadap kepentingan finansialnya. Selain itu, para pekerja media pun harus mau, secara simbolis, menerima tekanan politis dari petinggi media untuk tidak mengedepankan objektivitas pemberitaan, melainkan ada kepentingan politis yang subjektif serta legitimasi dari media untuk dipaksakan mengikuti ideologi dan kepentingan yang menguntungkan dari sisi lembaga media. Pekerja media lapangan hampir tidak memiliki ruang

untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta tanpa berpihak serta mengambil sikap.

Meski kurang begitu mendapatkan tempat dalam mengungkap kebenaran secara terbuka dan mengambil sikap secara penuh, wartawan lapangan kerap memanfaatkan ruang publik umum dalam menyatakan sikap mereka. Seperti keberadaan Kedai Kopi perjoeangan Jakarta yang menjadi ruang publik politis bagi wartawan di Jakarta dalam menyampaikan dan menyatakan sikap tentang kebebasan dan demokrasi pekerja media serta kebebasan politis pekerja dalam membangun kuasa pekerja pers maupun kelompok pekerja dan asosiasi yang berkaitan.

Para wartawan juga memanfaatkan ruang publik seperti kedai kopi perjoeangan sebagai wadah untuk pergerakan yang menuntut kepentingan politis bagi kelompok wartawan itu sendiri dengan membela para pekerja pers yang dibawah lini manajerial atau pekerja wartawan yang kerap dilapangan, serta membuat suatu pergerakan yang terselubung dan juga pergerakan terbuka untuk membentuk suatu aspirasi pekerja media terutama pers di Jakarta. Sehingga kedai ini kemudian juga menjadi bagian dari pembentukan kekuatan demokrasi bagi wartawan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemikiran Habermas dalam melakukan pengkajian terhadap kasus dan permasalahan komunikasi yang dialami oleh para pekerja pers media massa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama penelitian adalah **“Pertentantan Teoritis Pekerja Pers Media Massa dalam legitimasi politik dan ideologi media”**. Sehingga dalam hal ini, upaya penelitian juga memiliki tujuan utamanya yaitu **“Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Dunia Kehidupan (*Life World*) Pekerja Pers Media Massa dalam Ruang Publik dan bagaimana Kedai Kopi Perjoeangan sebagai Ruang Publik Wartawan Dalam Mewujudkan Demokrasi Deliberatif”**.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana demokrasi deliberatif yang diwujudkan oleh pekerja pers mealui Ruang Publik?
2. Bagaimana kedai kopi perjoeangan dimanfaatkan sebagai sarana ruang publik pekerja pers dalam mewujudkan demokrasi berpendapat dan bersikap?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Demokrasi Deliberatif

Istilah “deliberasi” berasal dari kata latin *deliberatio* yang lalu di dalam bahasa inggri menjadi *delberation*. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau kita telah memiliki kosa kata politis ini “musyawarah”. Penggabungannya dengan istilah “demokrasi” memberi makna khusus pada konsep demokrasi itu.

Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang

harus dilakukan oleh warganegara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan tersebut. Teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan=keputusan politis diambil dan dalam kondisi - kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warganegara mematuhi aturan-aturan ini. Dengan kata lain model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif itu. Opini- opini publik bisa jadi merupakan opini - opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka. Opini - opini itu juga dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheren yang dianggap sah secara universal dan rasional. (Hardiman, 2009b: 129).

Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warganegara dapat mematuhi opini-opini itu. Ruang publik adalah wadah bagi masyarakat untuk mewujudkan pandangan demokrasinya melalui kebebasan berpendapat, mengemukakan maupun membenuk pandangan serta dialektis penemuan diri individu dalam hal gagasan dan ide yang dikemukakan.

2.2. *Stand Point Theory* (Teori Sudut Pandang))

Teori Sudut Pandang (*Standpoint theory*) mengkaji bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosial. Permulaan untuk memahami pengalaman bukanlah kondisi sosial, ekspektasi peran, atau definisi gender, tetapi cara khusus di mana individu membentuk kondisi tersebut dan pengalaman mereka di dalamnya. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang dibentuk sebagian besarnya oleh kelompok sosial di mana mereka tergabung. (Littlejohn & Foss, 2009: 135).

Teori sudut pandang, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Hastock, berpijak pada lima asumsi khusus mengenai sifat kehidupan sosial: (West dan Turner, 2008: 181).

- Kehidupan material (atau posisi kelas) menyusun dan membatasi pemahaman akan hubungan sosial.
- Ketika kehidupan material distrukturkan dalam dua cara yang berlawanan untuk dua kelompok yang berbeda, pemahaman yang satu akan menjadi kebalikan dari yang satunya. Ketika terdapat kelompok dominan kelompok bawahan, dan pemahaman dari kelompok yang dominan akan bersifat parsial dan merugikan.
- Visi dari kelompok yang berkuasa menyusun hubungan material di mana semua kelompok dipaksa berpartisipasi.
- Visi yang ada bagi kelompok yang tertindas merepresentasikan pergulatan dan prestasi.
- Potensi pemahaman dari mereka yang tertindas (sikap) membuat dapat dilihatnya ketidakmanusiawinya dari hubungan yang ada di antara kelompok dan menggerakkan kita menuju dunia yang lebih baik dan lebih adil.

2.3. Konsep - konsep Pemikiran Habermas

2.3.1. Tindakan Komuniatif

Salah satu istilah penting yang kerap kali dimunculkan dalam perbincangan pemikiran Habermas adalah istilah rasionalitas komunikatif atau disebut juga tindakan komunikatif. Pertanyaannya kini, apakah yang dimaksud dengan rasionalitas komunikatif itu? Penjelasan mengenai rasionalitas komunikatif dari Habermas.

Pandangan mengenai rasionalitas, Habermas mengadopsi dari pemikiran Weber melalui teori rasionalisasi. Menurut Pusey (2011: 27), orientasi teori sosial Habermas secara fundamental bersifat Weberian karena ia ingin menganalisis budaya, pengetahuan, dan nalar sebagai bentuk yang Weber sebagai, dalam definisinya yang terkenal tentang Sosiologi yaitu “tindakan sosial yang bermakna”. Bagi Habermas, budaya adalah tindakan karena budaya adalah hal yang dilakukan oleh subjek, baik dalam pemikiran maupun perbuatan. Untuk memahami maksud dari istilah rasionalitas komunikatif, maka di sini dibutuhkan juga pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang diarahkan atau bekerja untuk mengejar seefektif mungkin kepentingan diri sendiri, bersifat menominasi dan menghegemoni. Rasionalitas instrumental ini juga bersifat monologis, dan juga bertujuan untuk mengontrol. Berbeda dengan rasionalitas instrumental, rasionalitas komunikatif adalah “rasionalitas” yang bekerja untuk mencapai kesepahaman bersama melalui bahasa atau sarana-sarana komunikasi yang lain. Dengan demikian rasionalitas komunikatif ini lebih bersifat dialogis ketimbang monologis, lebih ditujukan untuk mencapai penerangan(pencerahan) ketimbang paksaan atau dominasi.

Dalam praksis komunikasi, ilmu pengetahuan dipahami sebagai rekonstruksi yang membedakan pemahaman Habermas tentang ilmu pengetahuan sebagai refleksi dan pemahaman tradisional yang mengartikan ilmu pengetahuan sebagai sistem tertutup atau saintisme. Komunikasi menjadi alat refleksi kelompok masyarakat dalam mencari pembenaran dari sebuah fakta yang ada.

Sebagai rekonstruksi, pemahaman baru mengenai ilmu pengetahuan mensyaratkan kebebasan dan kesamaan derajat dalam sebuah aksi-tindak tutur yang bertujuan menguji validitas klaim ilmiah berdasarkan pengujian yang secara diskursif dilakukan dalam semangat meningkatkan pemahaman bersama yang diterima karena alasan yang lebih baik dan lebih rasional. Ilmu pengetahuan rekonstruktif menekankan kepentingan komunikatif yang menjunjung validitas klaim sebagai pemahaman timbal balik dan diperoleh melalui pertukaran argumentasi. (Hardiman, 2009: 33).

Tingkat-tingkat pembenaran yang lebih tinggi ini secara umum diperlukan untuk menyokong suatu masyarakat yang strukturnya lebih berkembang tetapi juga merupakan masyarakat pra modern dan tradisional yang memiliki karakteristik khas lainnya karena masyarakat ini diatur melalui aparatur negara yang kurang lebih dibedakan dengan jelas. Adapun dalam rasionalitas komunikatif atau tindakan komunikatif, agar kesaling pengertian dapat tercapai, maka setiap orang yang terlibat dalam praktik

komunikasi harus mengandalkan berlakunya beberapa syarat klaim validitas.

Dalam konsep Tindakan Komunikatif, Habermas mengatakan bahwa aktivitas komunikasi berorientasi pada klaim yang valid (klaim validitas) secara nyata berbeda, tetapi terkait dan saling melengkapi satu sama lain yaitu: (Lubis, 2015: 25)

1. Klaim kebenaran (*truth*), yaitu klaim menyangkut dunia alamiah objektif. Menyangkut pengungkapan sesuatu dengan benar.
2. Klaim ketepatan (*rightness*), yaitu klaim tentang pelaksanaan norma-norma sosial. Menyatakan sesuatu sesuai dengan norma/aturan komunikasi.
3. Klaim autensitas atau kejujuran (*sincerety*), yaitu klaim tentang kesesuaian antara batin dan ekspresi. Perkataan yang jujur.
4. Klaim komprehensibilitas (*comphrehensibility*), yaitu klaim tentang kesepakatan arena terpenuhinya tiga klaim di atas sebagai alasan yang mencukupi untuk konsensus.

Interaksi sosial tentu tidak hanya ditandai oleh konsensus yang dicapai secara rasional dan bebas tekanan, melainkan juga ditandai oleh paksaan dan kekerasan. Percakapan juga dapat berfungsi sebagai medium kekuasaan. Dalam hal ini Habermas berbicara tentang dua macam mekanisme tindakan: “mencapai persetujuan secara intersubjektif” atau konsensus dan “mempengaruhi” (*Einflußnahme*). Sementara konsensus terbentuk lewat pengetahuan bersama yang diterima secara intersubjektif, mempengaruhi bertitik tolak pada keyakinan monologal yang dianggap tepat dan benar oleh seseorang tanpa pengakuan orang lain. Apa yang dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain bukanlah alasan-alasan rasional, melainkan sukses atau efek dari tindakan mempengaruhi itu. Selain konsep tindakan komunikatif Habermas mengajukan konsep tindakan strategis (*strategisches Handeln*), yakni tindakan yang berorientasi pada keberhasilan seperti yang terjadi dalam tindakan mempengaruhi. Tindakan strategis tersebut mengandaikan bahwa orang mengerti ungkapan-ungkapan bahasa dan juga menjelaskan pendapatnya.

Dalam arti ini tindakan strategis sebenarnya bukanlah sebuah alternatif untuk tindakan komunikatif. Tindakan strategis juga bersifat rasional seperti tindakan komunikatif. Lalu apakah perbedaannya? Di dalam tindakan strategis orang menggunakan bahasa tidak sebagai medium pemahaman, melainkan sebagai alat untuk mekasakan kehendak. Sebuah alat untuk memaksakan kehendak lewat kata-kata atau bahkan kekerasan memang dapat dipakai untuk menghasilkan konsensus.

Menurut Habermas dalam Lubis (2015: 26) selain adanya empat syarat atau klaim validitas itu, dalam tindakan komunikatif, Habermas juga menekankan untuk terlaksananya komunikasi yang rasional atau komunikasi yang ideal. Adapun beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, setiap partisipan mesti diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam diskursus serta bebas mengajukan berbagai keberatan (kritik) atas sudut pandang peserta atau partisipan lain. *Kedua*, dialog yang berjalan mesti bebas dari paksaan, dominasi dan permainan

kuasa. *Ketiga*, partisipan dapat memahami perbedaan kriteria validitas klaim-klaim teoritis, moral-praktis dan estetis yang muncul dalam dialog lantas menyelesaikan dialog dan perbedaan melalui argumen. Keempat adanya persetujuan atau konsensus rasional terbuka terhadap perubahan dan pertimbangan lebih lanjut.

2.4.3. Dunia Kehidupan

Habermas mengembangkan konsep *Lebenswelt* (dunia-kehidupan) sebagai pelengkap untuk konsep tindakan komunikatif. Di dalam praksis komunikasi sehari-hari klaim-klaim kesahihan diandaikan begitu saja secara naif. Artinya, kita tidak membuat klaim - klaim itu sebagai tema dan juga tidak mempermasalahkannya, karena klaim-klaim tersebut merupakan bagian dari hal-hal yang secara kultural kebenarannya tidak dipersoalkan. Hal-hal yang diandaikan begitu saja ini penting untuk membuat proses pemahaman menjadi mungkin, karena hal-hal itu berfungsi sebagai basis kognitif komunikasi. Untuk komunikasi yang sedang berlangsung hal-hal tersebut membentuk suatu pengetahuan bersama yang bersifat pra-reflektif, tak dipersoalkan dan implisit. Pengetahuan itu beroperasi katakanlah “di belakang panggung” para peserta komunikasi, maka disebut Habermas “*Hintergrundwissen*” (pengetahuan - latarbelakang). Pengetahuan-latar belakang yang membentuk konteks komunikasi ini dan beroperasi di belakang proses-proses komunikasi verbal ini disebut Habermas dengan istilah yang sudah lama dikembangkan di dalam fenomenologi Edmund Husserl, yaitu: *Lebenswelt* (dunia kehidupan).

Habermas berpendapat bahwa sebuah pernyataan atau tindakan seseorang bersifat rasional sejauh alasannya dapat dijelaskan atau diakui secara intersubjektif. Penjelasan (*Erklärung*) dan pemberian alasan (*Begründung*) adalah ciri dasar dari klaim-klaim kesahihan yang bersifat rasional. Tidak semua bentuk komunikasi memiliki ciri-ciri tersebut. Secara umum kita bisa membedakan dua bentuk komunikasi: komunikasi “naif” dan komunikasi “reflektif”. Di dalam praksis hidup sehari-hari kita menggunakan komunikatif naif. Di dalam komunikasi macam ini kita tidak mempersoalkan secara khusus alasan-alasan maupun kejelasan dari pernyataan kita. Klaim-klaim kesahihan yang kita keluarkan lewat pernyataan-pernyataan kita tidak kita persoalkan, melainkan kebenaran kita andaikan begitu saja. Kita saling menukar informasi begitu saja. Bentuk komunikasi naif macam itu menandai tindakan komunikatif di dalam *Lebenswelt*. Di dalam percakapan ‘naif’ sehari-hari ini pembicara dan pendengar menimba informasi ataupun pernyataan-pernyataan mereka begitu saja dari sumber-sumber *Lebenswelt* mereka. Percakapan macam itu disebut Habermas tindakan komunikatif.

Bentuk komunikasi macam itu dengan klaim - klaim kesahihan sebagai objek problematisasinya yang oleh Habermas disebut “diskursus” (*Wacana*). Di dalam diskursus sepenggal *Lebenswelt* kehilangan cirinya sebagai pengetahuan latar belakang (*Hintergrundwissen*) karena setelah dijadikan tema komunikasi, pengetahuan latar belakang ini berubah menjadi pengetahuan-latar depan (*Vordergrundwissen*) yang bersifat eksplisit. Namun sementara konsensus pada tindakan komunikatif telah

diterima secara spontan dan dipakai oleh para peserta komunikasi tanpa pikir panjang lagi, para peserta diskursus kali ini harus menghasilkan konsensus lagi, tetapi pada taraf yang reflektif. Diskursus adalah bentuk refleksi (*Reflexionsform*) tindakan komunikatif. Maksudnya adalah bahwa diskursus adalah kelanjutan tindakan komunikatif dengan memakai sarana lain, yakni sarana argumentatif. (Hardiman, 2009: 43-45).

Habermas berpandangan bahwa sistem-sistem sosial disini dilihat sebagai sebuah dunia kehidupan yang telah terstruktur secara simbolik. Sedangkan “intergrasi sistem” dibicarakan berdasarkan kemampuan pengendalian yang spesifik dari sistem yang mampu mengatur dirinya sendiri (*self-regulated system*). Sistem-sistem sosial ini dianalisis berdasarkan kemampuan mereka dalam mempertahankan batasan dan kelangsungan eksistensinya dengan cara mengatasi kompleksitas lingkungan yang tidak menentu.

Menurut Habermas, dunia kehidupan dan sistem, sangatlah penting. Karena itu, persoalannya sekarang tinggal bagaimana menunjukkan keterkaitan di antara keduanya. Dengan perspektif dunia kehidupan kita akan dapat menyoroiti struktur-struktur normatif (nilai-nilai dan institusi-institusi) masyarakat. Peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi berdasarkan ketergantungan mereka terhadap fungsi-fungsi integrasi sosial akan dianalisa, sementara komponen-komponen bukan normatif sistem yang berfungsi sebagai kondisi-kondisi pembatasnya. (Habermas, 2004:97)

2.4.4. Ruang Publik

Ruang publik dapat dimengerti, diatas segalanya, sebagai ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Mereka mengklaim bahwa ruang publik ini diregulasi dari atas guna melawan otoritas publik. Inilah yang lantas menyeret mereka masuk ke dalam perdebatan seputar kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan - hubungan di dalam ruang pertukaran komoditas dan ruang kerja sosial yang secara mendasar telah terprivatisasi meski secara publik masih relevan. (Habermas, 2010: 41).

Habermas mencirikan peran ruang publik itu sebagai “papan pantul untuk masalah-masalah” atau “sistem peringatan dengan sensor-sensor yang tidak terspesialisasi namun sensitif ke seluruh masyarakat”. Hal ini berarti bahwa ruang publik yang berfungsi secara politis tidak hanya mampu mempersepsi, menemukan dan mensistematisasi masalah-masalah sosial-politis, melainkan juga dapat memediasi gaya - gaya hidup partikular yang majemuk dalam orientasi nilai mereka di satu pihak dan institusi-institusi birokratis dan ekonomi di lain pihak. Ruang publik politis membangun “struktur intermedietr” di antara kedua hal itu. Ia berfungsi sebagai sinyal untuk problem-problem yang harus dikelola oleh negara karena institusi-institusi formal yang berwenang untuk itu tidak dapat menyalurkan ataupun memecahkan masalah - masalah tersebut secara memuaskan. Pemahaman spontan mengenai ruang publik sebagai ranah yang terbuka bagi setiap orang untuk terlibat di dalamnya secara bebas ternyata secara historis berkembang meninggalkan maknanya yang bersifat spontan, dipahami menjadi sebuah konsep politik yang mengajukan

sejumlah syarat bagi setiap orang untuk bias terlibat di dalamnya. Habermas menyadari makna ruang publik yang secara politis dikonsepsikan sebagai sebuah sistem interaksi harus merefleksikan maknanya yang spontan sebagai sebuah kemungkinan yang terbuka bagi siapa pun untuk terlibat di dalamnya. (Hardiman, 2009: 139)

Ruang publik dapat dimengerti, di atas segalanya, sebagai ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Mereka mengklaim bahwa ruang publik ini diregulasi dari atas guna melawan otoritas publik. Inilah yang lantas menyeret mereka masuk ke dalam perdebatan seputar kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan-hubungan di dalam ruang pertukaran komoditas dan ruang kerja sosial yang secara mendasar telah terprivatisasi meski secara publik masih relevan. Medium bagi pertikaian politis ini agak istimewa sekaligus tanpa preseden historis sama sekali: pengguna rasio secara publik oleh rakyat. (Habermas, 2012: 44).

Sebelum ruang publik membentuk secara eksplisit fungsi-fungsi politis di dalam medan hubungan antar negara dan masyarakat yang penuh ketegangan, ternyata subjektivitas yang berakar di dalam ruang intim keluarga konjugat telah menciptakan publiknya sendiri. Bahkan sebelum pengendalian terhadap ruang publik oleh otoritas publik ditandingkan, yang akhirnya dimenangkan oleh penalaran kritis manusia-manusia privat mengenai isu-isu politis, sebuah ruang publik dalam bentuknya yang apolitis sudah berkembang di bawahnya lewat perintisan kesusastran mengenai pengoperasian ruang publik di wilayah politis. Masih menurut pandangan Habermas, bahwa Ruang publik hadir seluas otoritas publik, dan kita dapat melihat istana sebagai bagian darinya. Yang terkandung di wilayah privat adalah 'ruang publik' yang otentik, sebuah ruang yang dibentuk oleh masyarakat privat sendiri. (Habermas, 2012: 47).

2.4.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjabaran permasalahan dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dibuat kerangka pemikiran dengan melihat Tekanan Dominasi dan legitimasi yang diterima wartawan di industri media massa tempatnya bekerja, hal ini yang menjadi persoalan krisis dalam institusi individu maupun diri wartawan itu sendiri.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yaitu tidak ada keterlibatan peneliti dalam kegiatan kewartanan dan menjadi wartawan sebagai observer. Peneliti tidak terlibat secara langsung sebagai partisipan, melainkan peneliti sebagai observer. *Informan* sebagai partisipan berfungsi sebagai *observer* yaitu peran observer sekunder diserahkan kepada partisipan. Melalui metode ini, aspek-aspek yang tidak biasa, ganjil atau aneh bisa dideteksi selama observasi.

Observasi data penelitian disini, peneliti melakukan pengamatan di Kedai perjoengan, Menteng, Jakarta Pusat. Pengamatan ini dilakukan untuk mengobservasi kondisi dan situasi ruang publik para wartawan. Selain itu peneliti juga akan membua dokumentasi terkait dengan penelitian tersebut sebagai bahan data sekunder penelitian.

4.5.1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan reflektif hermeneutis atau hermeneutika dalam yang menekankan upaya melakukan pembacaan teks yang sangat dekat dan terperinci untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta merefleksikan perspektif kajian dan pemahaman terhadap teori maupun fenomena yang terjadi. Teks dapat berarti pembicaraan, kata – kata tertulis, atau gambar. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model hermeneutika Habermas yaitu penafsiran terhadap subjek (individu) sebagai teks. Pembahasan Habermas terhadap penjelasan dan pemahaman menunjukkan indikasi awal bahwa ternyata ada perbedaan orientasi hermeneutis antara keduanya.

Habermas merubah anasir-anasir Penjelasan (*Eklaren*) menjadi anasir-anasir Pemahaman (*Verstehen*). Anasir-anasir pemahaman disini mencakup sebagai berikut: (Riyadi dalam buku “Belajar Hermeneutika”, 2010: 220 - 221)

1. Pemahaman itu bersifat *experimental-oriented-subjektif*. Dari sifat tersebut, maka pemahaman menjadi bagian integral-subjektif dalam penjelasan, karena pemahaman mengakomodir faktor pengalaman subjek.
2. Pemahaman adalah bertemunya pengertian teoritis (penjelasan) dan pengalaman (pemahaman). Dari sifat tersebut, maka ketika menginterpretasikan suatu objek fakta, maka subjek telah berempatif, dan pengalaman hidup si subjek mempengaruhi konstruk hermeneutik.
3. Adanya makna pada diri objek dipengaruhi juga oleh adanya pemaknaan dari subjek.

Jadi, subjek berhak untuk “memaknai” sebuah objek. Maka makna baru bagi sebuah objek akan ditentukan oleh dinamisme-kritis dari aktifitas interpretatif subjek. Tidak ada fakta terkonstruksi-naturalis. Sebelum adanya interpretasi subjek, maka fakta adalah tak terkonstruksi.

Gambar 2
Skema Hermeneutika Habermas

*Sumber: Riyadi dalam buku
"Belajar Hermeneutika", 2010:
220 - 221*

Penafsiran yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menafsirkan relasi dalam interaksi masyarakat dalam lingkup pekerja pers di dalam ruang publik Kedai Kopi Perjoeangan, dan juga menafsirkan bentuk-bentuk tindakan komunikasi melalui relasi bahasa dan bagaimana kekuasaan bahasa yang digunakan dalam dominasi dan legitimasi yang diberlakukan bagi pekerja.

Jika kita memahami masyarakat sebagai sistem, maka fakta bahwa realitas sosial terletak di dalam faktisitas klaim-klaim kesahihan yang diakui, bahkan sering kontra-faktual, tetap tidak akan terpahami. Dengan perspektif sistem, maka peneliti akan dapat menyoroti mekanisme-mekanisme pengendalian masyarakat dan perluasan wilayah kemungkinan (*contingency*). Kita akan mengenali peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi tersebut berdasarkan ketergantungan mereka pada fungsi-fungsi integrasi sistem, sementara nilai-nilai tujuan berfungsi sebagai data. Sistem-sistem sosial ini dianalisa berdasarkan kemampuan mereka dalam mempertahankan batasan dan kelangsungan eksistensinya dengan cara mengatasi kompleksitas lingkungan yang tidak menentu.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Relasi Antara Ruang Publik dan Media Massa

Pada akhir abad ke-17 dan memasuki abad ke-18, terjadi perubahan bentuk menjadi surat kabar (*newspaper*). Perubahan ini awalnya dimulai dengan penggabungan pamflet-pamflet dalam jumlah halaman yang kecil menjadi bentuk terbitan dalam halaman yang lebih banyak (pada saat itu dikenal dengan sebutan *newsbooks*). Namun, karena *newsbooks* masih dianggap kurang memadai untuk menampilkan informasi yang lebih banyak, maka surat kabar pun dibentuk dengan ukuran dan jumlah halaman yang lebih banyak. Usaha-usaha penerbitan surat kabar untuk mencari keuntungan kemudian mulai dikembangkan oleh para pengusaha, bahkan oleh keluarga dalam bentuk usaha rumah tangga. Pada 1816 koran-koran kemudian dicetak untuk pertama kalinya dalam jumlah yang besar; 50.000 eksemplar (Habermas, 1989:168). Reputasi penerbitan kemudian tidak lagi

bertumpu pada kemampuan pewarta atau editor seperti yang dilakukan oleh individu-individu penulis pamflet, tetapi lebih dilihat berdasarkan popularitas surat kabar. Proses komodifikasi ini membawa dampak pula bagi kemunculan peredaran surat kabar pertama di berbagai negara. Persaingan antar penerbit pun kian membesar ketika teknologi baru mulai bermunculan. Pers terus berkembang menjadi ruang dalam penyampaian opini publik, hingga kemudian konsep jurnalisme publik dikenal.

Menurut Habermas otonomi pewartaan para editor dibatasi dengan sangat ketat, bahkan di dalam jenis pers yang tidak tunduk kepada hukum-hukum pasar selain tujuan politis semata. Hal ini dalam hubungannya dengan jurnalisme kesusastraannya jurnal-jurnal yang mengedepankan perdebatan rasional kritis. Untuk sementara waktu, pers politik memang dikelola menurut gaya individualistis, bahkan setelah faksi-faksi dan partai-partai di parlemen Inggris raya dan perancis mendirikan pers politiknya masing-masing. Aspek-aspek transformasi struktural pers yang berkaitan dengan sosiologi kegiatan bisnis tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan umum kala itu menuju pengonsentrasian dan pemusatan bisnis. Homogenisasi layanan berita oleh badan-badan pers yang terorganisasi editorial surat kabar harian skala kecil lewat penggunaan plat bersama dan berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang pelengkap lainnya. (Habermas, 2012: 261)

Arah pergeseran dari jurnalisme sastraan privat menjadi jasa layanan publik media massa ini, ruang publik diubah oleh gelombang kepentingan privat yang memperoleh hak istimewa bagi penyiarannya meski tujuan sama merek sama sekali bukan representasi bagi kepentingan-kepentingan masyarakat privat sebagai publik. Pemisahan ruang publik dan ruang privat ini menyiarkan bahwa persaingan di antara kepentingan-kepentingan privat pada prinsipnya diserahkan kepada pasar sebagai kekuatan pengaturnya dan dipertahankan di luar konflik opini. Namun begitu, bagi tindakan-tindakan ruang publik yang menjadi wilayah pengiklan bisnis, masyarakat privat sebagai pemilik “properti privat” memiliki efek langsung terhadap masyarakat privat sebagai publik. Di dalam proses ini yang jelas adalah perubahan ruang publik menjadi medium periklanan didominasi sepenuhnya oleh komersialisasi pers. Sebaliknya, komersialisasi tersebut juga digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan pengiklan bisnis yang secara independen lahir dari konfigurasi-konfigurasi ekonomi itu sendiri. (Habermas, 2012: 261)

Habermas memulai pemaparan mengenai relasi ruang publik dan pers dengan mengkaji pengertian-pengertian tentang ruang publik. Dalam masyarakat feodal, publik dipahami sebagai status sosial yang bersifat keningratan. Kalangan penguasa dan gereja adalah orang-orang publik yang memiliki hak istimewa di hadapan masyarakat umum. Pada masyarakat feodal ini, Habermas memandang bahwa antara ruang publik dan ruang privat belum terdapat pemisahan yang jelas. Pemisahan ruang publik dan privat baru mulai ditemukan pada masyarakat Romawi di mana publik benar-benar ruang tempat kepentingan-kepentingan publik diperjuangkan. Sementara itu privat menjadi urusan pribadi setiap individu. Di dalam ruang publik, masyarakat dapat berdiskusi, melakukan kritik dan

menyampaikan pendapatnya. Ruang publik menjadi tempat yang bisa diakses oleh semua orang, bersifat terbuka, dan inklusif. Konsep ruang publik ini diterima sebagai ruang demokratis hingga saat ini. Pemaparan Habermas mengenai ruang publik dan pers tidak lepas dari tinjauannya mengenai perkembangan kapitalisme di Eropa. Kapitalisme awal di abad ke-17 memperlihatkan pertemuan antara kepentingan-kepentingan masyarakat di ruang publik, dengan pers sebagai saluran aspirasi publik. Pengelolaan informasi dimulai dari hal sederhana yang langsung berkaitan dengan kepentingan bisnis, seperti informasi mengenai barang dagangan yang diperlukan masyarakat. Sebagaimana yang dianalisis Habermas, ruang publik dan saluran publik sebagai tempat pertemuan masyarakat lambat laun bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu saluran publik yang hingga saat ini besar sekali manfaat dan pengaruhnya bagi masyarakat adalah pers. Kelahiran pers di Eropa, terutama di Inggris, Perancis, dan Jerman, telah mengubah struktur sosial masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya sangat feodal, lambat laun kekuatannya mulai berkurang. Peranan kaum borjuis sangat besar dalam melakukan transformasi tersebut. Mereka membuka ruang publik sastra di mana individu-individu dapat berkumpul dan mendiskusikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan bersama. Dari ruang sastra inilah ruang publik politis muncul, dan dianggap sebagai cikal bakal semangat kemunculan pers. Di dalam ruang publik sastra, setiap individu privat diberi hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, pandangan, maupun kritik. Begitu pula orang-orang yang datang ke kedai-kedai – sebagai tempat di mana ruang publik sastra berlangsung – tidak hanya didominasi oleh kalangan borjuis, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat umum. Perkembangan pers ini pada akhirnya mengubah apa yang disebut sebagai kelas menengah (borjuis). Ia bukan hanya berasal dari kalangan pedagang sebagaimana makna awalnya, tetapi sudah menyebar meliputi kalangan intelektual, para pekerja, maupun pegawai. Pemisahan antara ruang publik dan ruang privat pun sudah mulai dilakukan. Memasuki era kapitalisme terutama di abad ke-17, ruang publik mulai mendapat ancaman. Ancaman yang dimaksud bukan dalam pengertian sensor dari kekuasaan, tetapi ancaman dari komersialisasi pers sebagai ruang publik kritis. Habermas melihat bahwa komodifikasi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha terhadap berita dan pers menjadikan ruang-ruang kritis masyarakat semakin berkurang. Pers kini lebih banyak memuat berita-berita tentang kejahatan, seks, gosip, maupun hal-hal yang sensasional. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya, pers terus mengalami peningkatan dari segi jumlah pembaca. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan koran mulai diorganisasikan ke dalam perusahaan-perusahaan besar berskala nasional maupun internasional. Penciptaan nilai, pembagian rubrikasi berita, dan tabloidisasi dilakukan demi tercapainya keuntungan dari bisnis penerbitan tersebut. Habermas melihat ruang publik sudah tidak ada lagi batasannya dengan ruang privat ketika iklan-iklan ini muncul di dalam pers. Habermas konsisten terhadap pemisahan yang ia lakukan antara ruang publik dengan ruang privat. Baginya, ruang privat tidak boleh dicampuradukkan dengan ruang publik. Namun sayangnya hal tersebut kini

sudah menjadi biasa, iklan-iklan yang muncul di dalam pers memperlihatkan bagaimana pertarungan-pertarungan kepentingan privat telah masuk ke dalam wilayah publik. Pers pun menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Kalau keadaannya sudah seperti ini, maka pers sebagai ruang publik kritis berubah menjadi panggung perdagangan dan panggung tontonan.

Menurut Ashadi dalam buku membangun Kebebasan Pers yang Beretika (2006: 69) menjelaskan bahwa media pers tidak berada di ruang hampa. Karenanya silang sengkabut pelaksanaan dan penataan kode etik wartawan oleh pelaku profesi kewartawanan tidak terlepas dari praksis norma penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Jurnalistik sebagai keterampilan teknis dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari propaganda, bahkan pornografi. Teknik jurnalistik dapat digunakan untuk kepentingan pragmatis komunikator dan khalayak. Komodifikasi informasi pers merupakan bentuk yang umum dalam penggunaan teknik jurnalistik. Sedang jurnalisme bertolak dari epistemologi yang membawa konsekuensi dalam metodologi dan konteks keberadaannya dalam memproses fakta publik. Landasan operasi dari epistemologi jurnalisme adalah fakta publik dalam kaitan dengan ruang publik.

Gambar 5.1.

Pembedaan atas operasi media pers, dapat dilihat konstelasinya

Jurnalisme publik muncul sebagai jawab atas problem yang dihadapi pers sebagai ruang publik. Dalam pandangan Habermas, jurnalisme publik ini berupaya untuk mengembalikan fungsi pers sebagai ruang publik kritis sebagaimana yang dilakukan saat kemunculannya. Pers harus dibentuk sebagai media perjuangan, media penyampaian aspirasi, ekspresi, dan opini publik, serta harus menjadi pembela pada kepentingan emansipatoris. Inti dari jurnalisme publik tersebut tidak lain untuk mendorong keterlibatan masyarakat di dalam partisipasi publik secara lebih luas. Ketika teks produksi pers tersebar secara luas, maka teks sudah masuk ke dalam konsumsi ruang publik sehingga dalam arti diatur dalam perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. Teks ketika keluar dan tersebar, maka teks dapat diinterpretasikan secara bebas. Sehingga penafsiran terhadap teks (baik tulisan atau penuturan seseorang) bisa bebas.

Aturan prosedur di dalam penafsiran memperhatikan aspek manusia dan rasio individu yang otonom yang dipahami.

4.2. Pembahasan

Kedai Kopi Perjoeangan sebagai Ruang Publik bagi wartawan media massa di Jakarta merupakan salah satu wadah untuk menyampaikan beragam aspirasi dan juga menyampaikan keluhan dan pembicaraan mengenai persoalan-persoalan wartawan selama berada dalam lingkup industri jasa media massa dan juga ruang publik Kedai Kopi Perjoeangan merupakan bagian dari suatu pergerakan simbolis bagi wartawan dalam membangun kekuatan politik untuk menegaskan Demokrasinya. Hal ini tentunya pergerakan politis wartawan dalam berkumpul atau seperti adanya adanya suatu aktivitas ‘berserikat bawah tanah’ dalam membela kepentingan hak jurnalis terutama hak dalam memperoleh pendapatan yang layak dan juga hak untuk memperoleh keuangan waktu dan jam kerja serta hak dalam menentukan waktu untuk kepentingan pribadinya.

Keberadaan Kedai Kopi Perjoeangan sendiri sebenarnya hanyalah sebatas suatu kedai kopi yang bertujuan bisnis selayaknya cafe biasa. Tempat untuk pelanggan yang ingin santai, bisa melakukan perbincangan bebas dengan teman atau kelompok, kemudian selain menikmati makanan dan minuman, kedai kopi perjoeangan juga menjadi tempat bebas bagi para perokok untuk merokok di dalam, sehingga Kedai Kopi Perjoeangan merancang konsep manajemen cafe yang mengabaikan aturan merokok dan pengunjung diberikan kebebasan untuk merokok serta melakukan perbincangan bebas di tempat selama memenuhi kode etik umum. Segmentasi kedai kopi sendiri untuk kalangan menengah kebawah sehingga tidak membatasi pengunjung berdasarkan kelas sosialnya.

Kedai Kopi Perjoeangan mengangkat konsep kedai kopi dengan tujuan pemenuhan hak konsumsi bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini juga terlihat dari menu-menu konsumsi seperti konsumsi makanan dan minuman yang harganya sangat terjangkau terutama bagi pekerja yang *range* pendapatannya dibawah 3 juta, dan juga sesuai dengan segment mahasiswa. Tak jarang kelompok-kelompok berserikat atau berorganisasi juga menjadikan Kedai Kopi Perjoeangan sebagai wadah untuk saling berbagai, bertukar informasi, membangun interaksi sosial yang baru serta membentuk jaringan dengan kelompok-kelompok sosial yang memiliki permasalahan visi yang sama.

Dapat diamati berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa bahwa meski tak terlihat secara langsung, Kedai Kopi Perjoeangan sebagai ruang publik yang memiliki elemen fungsional di wilayah politis memiliki status normatif sebuah organ yang jadi media pengartikulasian diri masyarakat sipil di dalam otoritas negara terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya. Prakondisi sosial bagi ruang publik borjuis yang ‘sedang berkembang’ ini adalah pasar, yang cenderung diliberalkan, yang menjadikan perkara-perkara di ruang reproduksi sosial sebanyak mungkin sebagai persoalan masyarakat privat untuk mereka tangani sendiri, sehingga dengan demikian menyempurnakan privatisasi bagi masyarakat sipil. Di bawah absolutisme, pembangunan masyarakat sipil sebagai wilayah privat ini awalnya hanya

dipahami dalam pengertiannya yang privatif, bahwa relasi hubungan sosial dilucuti dari karakter kuasi publiknya. Wilayah yang dipisahkan dari ruang publik ini, bagaimanapun, sudah 'privat' dalam artian bebas dari aturan otoritas negara. (Habermas, 2012: 106).

Ruang publik yang dicakukan oleh pers yang utama adalah media itu sendiri sebagai wahana publik untuk berkomunikasi. Sementara Kedai Kopi adalah bentuk ruang fisik yang menjadi wadah bagi khalayak pers tertentu dalam membangun komunikasinya. Media sendiri tidak bisa begitu saja terprivatisasi karena harus berada di bawah naungan aturan-aturan yang berlaku, dari aturan negara, maupun ideologi instansi. Kedai fisik sendiri, masih bisa membangun privatisasi wartawan yang bebas.

Dijelaskan melalui *validity claim* (Klaim Validitas) di dalam ruang publik Kedai Kopi Perjoeangan yang dimana terdapat adanya kelompok kecil pekerja pers media massa, pada klaim kejelasan, komunikasi secara terbuka dalam pendekatan personal antar kelompok wartawan dalam satu pemahaman yang sama yang dimiliki oleh antar wartawan, kemudian memiliki kesamaan visi pekerjaan dan kesejahteraan dan permasalahan yang sama terkait masalah profesionalitas wartawan dan kelayakan hidup wartawan dari sisi pendapatan, sehingga kemudahan untuk memahami setiap perkataan dan bahasa yang digunakan antar wartawan dapat ditangkap sebagai kode khusus yang dipahami oleh masing-masing wartawan. Sehingga akan terasa asing di telinga khalayak umum yang tidak berada di profesi tersebut. Selain itu adanya sharing informasi dan saling berbagai membantu antar wartawan sehingga memudahkan dalam menjalin relasi dengan kelompok independennya, dengan beda kelompok, dan juga dengan membagi kontak atau relasi dengan pihak luar seperti narasumber dari kalangan individu, atau figur publik, pemerintahan hingga lembaga swasta lainnya.

Kemudian pada klaim kebenaran bahwa segala bentuk informasi adalah mengacu pada kebenaran terhadap masalah pekerja dan situasi yang dialami, sehingga penting keterbukaan sebagai point inti di dalam kelompok wartawan dan perbincangan dalam ruang publik. Selain itu kejujuran sebagai landasan utama di dalam mencari solusi wartawan serta menggaungkan penegakan demokrasi kelompok wartawan. Permasalahan-permasalahan akan mudah dipahami dan diidentifikasi melalui komunikasi yang dilakukan oleh agen atau pekerja pers media itu sendiri. Komunikasi yang dibangun pun atas dasar kelompok atau profesionalitas pers sesuai dengan pandangan profesinya, tidak memihak pada kelompok atau golongan tertentu, termasuk tidak memihak pada pandangan politik tertentu.

Berdasarkan dari skema penafsiran mendalam seperti yang diskemakan oleh Habermas, maka peneliti dapat mengamati beberapa kajian teoritis terkait pendekatan Hermeneutik disini. Dalam menyikapi sebuah dunia kehidupan pekerja pers media massa di Jakarta, wartawan bekerja berada dalam lingkup struktur yang ketat dan juga adanya bentuk-bentuk legitimasi yang didapat wartawan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang Jurnalis. Industri media masih terlalu mengadopsi pandangan-pandangan tentang praktik jurnalisisme lama bahwa

konsepsi bekerja wartawan adalah 24 jam atau tidak mengenal batas. Hal ini kemudian menjadi praktik yang disalah artikan bahwa lingkup 24 jam bekerja adalah rutinitas yang tidak boleh ada hentinya. Sehingga leitimasi yang didapatkan bahwa adanya krisis pemahaman antara para pelaku awak media yang berada di ranah manajemen atas seperti dewan redaksi atau strktural keredaksian seperti Pimpinan Redaksi, Redaktur hingga tingkat Koordinator liputan pun seperti menjadikan pekerjaan para wartawannya adalah pekerjaan yang tiada henti, seperti operasionalisasi mesin yang bekerja diatas 12 jam.

Pemaknaan ini pun disalah gunakan sebagai pandangan yang legitim bahwa kepentingan keredaksian adalah segala-galanya. Sementara ruang dan waktu dalam gerak wartawan pun terbatas karena harus ada kesiagaan apabila ada berita yang harus diliput setiap saat, termasuk persoalan politis pada awak redaksi yang berada di lini atas yang memiliki kepentingan dengan pihak luar, dijadikannya sebagai pemahaman yang difokuskan pada kerja dan kewajiban wartawan untuk meliput segala bentuk kegiatan figur politik dan lembaga yang menaungi seperti parlemen ataupun partai, dan ada nilai keuntungan yang diperoleh instansi media apabila ada bentuk kerjasama peliputan informasi yang menguntungkan dan bisa mendatangkan finansial. Namun di satu sisi, pihak wartawan yang berada di lini bawah yang dikorbankan dari sisi waktu dan tenaga, serta wartawan yang bekerja ekstra di lapangan pun tidak diberikan ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pekerjaannya lantaran dirinya harus siap atau dikenal dengan istilah *stand by* di tempat *plot positioning* sambil jemput bola menunggu ada informasi atau pemberitaan yang datang. Sehingga wartawan pun untuk bisa meluangkan waktu untuk keluarga atau waktu untuk kepentingan dirinya pun menjadi terhambat lantaran adanya aturan waktu kerja dan peliputan serta target peliputan berita sehingga tidak ada ruang dan waktu yang cukup lowong bagi wartawan untuk mengurus kepentingan dirinya.

Dapat dikatakan bahwa kebebasan Pers, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers No.40/1999, mengenai kebebasan pers, hanya milik instansi media atau kepemilikan media, sementara dalam prakteknya bukanlah milik wartawan itu sendiri. Artinya bahwa kebebasan dalam implementasi lapangan adalah milik kepentingan media bukan wartawan itu sendiri. Sehingga sulit bagi wartawan menerapkan kebebasannya sendiri dalam menjunjung nilai demokrasi yang sewajarnya. Menurut Albert Camus, kebebasan pers barangkali merupakan kebebasan yang paling banyak tertindas karena merosotnya ide dasar kebebasan. Kebebasan pers tidaklah menjamin suatu negeri mencapai keadilan dan kedamaian, tetapi tanpa kebebasan pers, suatu negeri pasti tidak akan mencapai keduanya. Karena keadilan hanya akan terbukti jika rakyat dihormati hak-haknya, dan hak tidak ada artinya jika tidak diwujudkan. Mengutip kata Rosa Luxemburg “Tanpa kebebasan pers yang tidak terbatas, tanpa kebebasan mutlak, kekuatan dominan massa tidak dapat dipahami.” (Camus, 2017: 35).

Dapat dikatakan bahwa dunia kehidupan pekerja pers media massa sendiri, melakukan upaya pemahaman terhadap dunia sosialnya sebagai

lingkup sosial yang heterogen, yaitu dimana para pekerja pers lebih banyak berinteraksi dengan sesama pekerja media massa walaupun tidak seluruhnya interaksi dilakukan di lingkup satu instansi media, namun para pekerja pers media massa juga berinteraksi dengan pekerja pers dari media lain. Sehingga lingkup dunia sosial oleh pekerja pers media massa sendiri tidak lepas dari lingkup pekerja itu sendiri karena memiliki kesamaan visi dalam menanggapi dunia kehidupannya. Adapun pekerja pers sendiri dalam memaknai dirinya sendiri sebagai individu yang membutuhkan nilai finansial lebih sebagai hal yang dikorbankan dalam pekerjaan yang mencakup waktu dan tenaga, serta lingkup ruang yang tanpa sadar 'mau' dibatasi oleh pihak media. Sehingga dalam hal ini pekerja pers media massa dapat dikatakan sebagai pihak yang terasing. Dalam konsepsi dunia kehidupan disini, pekerja pers media massa tidak lepas dari kehidupan yang penuh dengan struktur dan sistem yang mengikat. Sehingga terjadi adanya krisis dalam legitimasi pekerja pers media massa. Krisis yang terjadi dalam sistem-sistem sosial sejatinya bukanlah akibat dari perubahan-perubahan aksi-dental lingkungan, melainkan lebih merupakan akibat dari tuntutan-tuntutan objektif sistem (*system-imperative*) yang inheren secara struktural dan yang secara hierarkis tidak dapat didamaikan, apalagi disatukan.

Konflik keyakinan pada pekerja pers media massa sendiri sebenarnya menginginkan adanya kerja yang proporsional, bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian pemenuhan standar kode etik sebagai wartawan bisa dijalankan serta ada bagian dari kebebasan pers milik wartawan dalam menentukan sudut pandang objektivitasnya yang beretika.

Selain itu pada subsistem pola pemeliharaan yaitu adanya pembinaan secara kultural yang dibentuk melalui visi - misi atau ideologi perusahaan sebagai pemeliharaan anggota di dalamnya, dan difungsikan sebagai paksaan simbolis untuk tujuan motivasional. Dalam hal ini wartawan di lini bawah dipaksa untuk mengikuti pandangan legitimasi atasan atau pimpinan sebagai operasional prosedur yang harus dijalankan oleh wartawan. Adapun pada sub sistem integrasi seperti hukum ini wartawan pun harus melanggar aturan-aturan atas hukum perundang-undangan yang menaunginya. Seperti tidak sepenuhnya memenuhi kaidah Undang-undang atau regulasi mengenai pers, kemudian pelanggaran atas norma-norma umum yang berlaku bagi pekerja media massa seperti mengharapkan imbalan besar dan tidak memandang adanya imbalan dari narasumber ataupun lembaga dan kepentingan politis, praktik jual beli berita dan tindak pemerasan, joki politik dan lain sebagainya, selain itu mengabaikan kontrol sosial dengan membenturkannya melalui pola keberpihakan atau mengabaikan keberimbangan.

Mengikuti pandangan Parsons bahwa *resource* yang terdapat pada masing-masing subsistem dimunculkan dalam bentuk media umum untuk memperantarai hubungan pertukaran mencakup media uang, kuasa, pengaruh, dan komitmen. Masing-masing media digunakan untuk menstrukturkan interaksi dengan cara tertentu sehingga tuntutan fungsional subsistem khusus bisa dihargai, misalnya pekerjaan publik dimaksimalkan

dengan mempertimbangkan efisiensi, dan lain sebagainya. (Heath dalam Habermas, 2016: 12).

Kebutuhan-kebutuhan pada dewasa ini diantaranya adalah kebutuhan dalam komunikasi dan teknologi. Kebutuhan yang dilandaskan pada komunikasi adalah bahwa individu memerlukan suatu wadah dalam keterbukaan, menyampaikan kebenaran serta adanya keakuratan dalam berkata dan penjelas. Sehingga keberadaan teknologi berupaya untuk menunjang itu semua.

Gambar 3
Tipe-tipe Media yang Mempengaruhi Profesionalitas Kewartawanan Sangsi

	Positif	Negatif
SALURAN	Bujukan (Uang)	Paksaan (Kekuasaan)
Intensionalitas	Persuasi	Teguran
Situasional	(Pengaruh)	(Komitmen)

Sumber: Habermas, 2016: 13

Dalam analisa ini, ditemukan bahwa perekrutan dalam pekerjaan sebagai wartawan selalu dilakukan secara legitim melalui bujukan materi, adanya uang. Termasuk dalam kesaksian dari wartawan seperti Isna maupun Alvan yang mengatakan bahwa, awal diminta untuk meliput segala bentuk kegiatan rekanan politik dapat menghasilkan uang sampingan dan pendapatan tambahan, namun hal ini hanya sebatas pembicaraan formalitas karena dalam implementasinya tidak sesuai yang dijanjikan. Kemudian adanya paksaan dari instansi bahwa pelaksanaan kegiatan peliputan oleh para pekerja media di lini bawah adalah keharusan mengikuti perintah atasan, apabila tidak melakukannya akan diberikan ancaman pemberhentian atau kewenangan untuk pemutusan kerja sepihak. Disini instansi media menggunakan kewenangan dan kekuasaannya terhadap pekerja-pekerja di lini bawah. Pada aspek persuasi, bahwa tenaga kerja haru dipengaruhi dengan wawasan ideologis media agar dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dijalankan oleh instansi media dengan didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang mengikatnya. Ideologi membangun persuasi legitim bukan hanya terhadap masyarakat saja, namun terhadap pekerja pun diberlakukan suatu pandangan-pandangan legitim yang menekan wartawan di lini bawah.

Dapat terlihat bahwa ideologi borjuis pun masih menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ideologi borjuis terstruktur berdasarkan satu pembagian antara 'ide-ide' dan sesuatu yang diduga 'riil',

‘tempat lain’ dari agama dan konsep mistis tidak ditampilkan, tapi ideologi mengacu pada dirinya hanya melalui transendensi ide. Teks borjuis, menurut Lefort, tertulis dalam bentuk kapital: Humanitas, Kemajuan, Sains, Kekayaan, Keluarga. Ide-ide tersebut menggambarkan satu perlawanan antara subjek yang berbicara dan membangun dirinya berdasarkan aturan yang dibuat oleh ide dengan ‘yang lain’ yang tidak memiliki akses pada aturan tersebut dan karena itu dihilangkan harga diri sebagai subjek. Perbedaan itu diekspresikan dalam serangkaian dikotomi: pekerja/borjuis, biadab/beradab, gila/normal, anak-anak/dewasa. Berdasarkan dikotomi tersebut memunculkan ‘makhluk alam’ yang memiliki image yang mendukung afirmasi sebagai masyarakat yang berada diatas alam. Sehingga hal yang ditekankan dalam ideologi borjuis adalah kenyataan bahwa wacananya tetap dipisahkan. Ia tidak ‘berbicara’ dari satu tempat, tapi berbagai tempat dan membagi dirinya berdasarkan perbedaan institusi sosial (negara, hukum, perusahaan, bisnis, sekolah). Terdapat sifat saling mempengaruhi terus menerus dalam prosedur legitimasi dan penipuan, dibawa untuk berperan di sini dan di sana. Jadi perbedaan ini dipertahankan antara wacana dan kekuasaan. (Thompson, 2007: 50).

Teguran atau komitmen yang diperuntukkan pekerja sebagai pihak yang sebenarnya tidak otonom dalam mengikuti suara hati atau kehendak hati untuk lebih obyektif menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Hal ini dihantui dengan adanya bentuk komitmen wartawan yang tergabung pada suatu media dengan aturan-aturan yang berlaku termasuk aturan yang mengikat, termasuk legitimasi yang diberikan.

Oleh karena itu, melalui pergerakan kelompok kecil wartawan yang tergabung dalam Kedai Kopi Perjoeangan, berupaya untuk membalikkan skema / struktur materi itu semua menjadi mengacu pada kepentingan kelompok wartawan terutama kelompok wartawan di lini bawah. Keberadaan kelompok pekerja pers media massa di lingkup ruang publik Kedai Kopi Perjoeangan.

Untuk membalikkan itu maka, dukungan penuh dari seluruh kelompok wartawan lini bawah sangat diperlukan. Ketentuannya pun berlaku dalam tindakan komunikatif, yaitu bahwa setiap wartawan sebagai partisipan dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan gagasan asalkan gagasan yang disampaikan bersifat memiliki data dan fakta yang ada atau yang pernah dilihatnya. Sehingga bukan gagasan yang muncul dari pemahaman yang fiktif. Contoh, keterkaitan kasus-kasus yang terjadi di kalangan wartawan, perlakuan yang buruk terhadap para kelompok pekerja pers media massa. Hal ini diceritakan dengan didasarkan pada pengalaman wartawan dalam melihat realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut terlihat bagaimana problematika dan konflik yang dialami oleh pekerja pers.

Suara yang berlaku, haruslah sama dan banyak, serta pesan yang disampaikan juga harus sama, sehingga pergerakan kelompok pekerja pers ini akan makin mudah untuk dilakukan. Sehingga keberadaan wartawan sebagai partisipan sangat diperlukan dalam membangun sebuah kelompok demokratis yang didasarkan pada banyak suara untuk digaungkan kepada

lembaga penaungan pers dan lembaga pemerintah dalam memperhatikan keberadaan wartawan di Indonesia.

Implementasi dalam partisipasi aktif yang dilakukan oleh wartawan juga mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan independen seperti mengadakan diskusi rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan, kemudian juga mengikuti mini seminar atau workshop yang dilaksanakan di kedai kopi perjoeangan, kemudian juga rutin dalam mengadakan pertemuan dengan antar anggota kewartawanan, sehingga tetap terjalin relasinya.

Keterlibatan wartawan di dalam kelompok pekerja pers di Kedai Kopi Perjoeangan tidak didasarkan pada paksaan atau adanya bentuk kuasa dan dominasi tertentu, namun hal ini murni dilakukan dalam kepentingan wartawan itu sendiri dalam kelompok. Namun dapat diamati bahwa ada suatu pergerakan yang membentuk kekuatan politik sendiri dengan mengupayakan ada suatu pergerakan bersama untuk mendominasi suatu hubungan dengan pihak luar tanpa ada campur tangan resmi dari instansi media yang memang digerakkan oleh kelompok wartawan itu sendiri, termasuk mengupayakan kekuasaan yang didasarkan pada prinsip demokrasi kewartawanan dalam menuntut adanya pemberlakuan yang adil dan seimbang tidak memihak pada golongan tertentu.

Selain itu di dalam perbincangan dengan kelompok wartawan, terdapat suatu persetujuan dalam percakapan serta menangkap dan sebagai bahan diskusi gagasan wartawan dalam menyikapi percakapan di lingkungan kelompok pekerja pers media massa. Sehingga dalam hal ini, Kdai Kopi Perjoeangan sebagai wadah demokrasi ini membangun suatu pandangan deliberatif yang dimana pekerja pers media massa membangun kekuatan politiknya sendiri, dan juga membentuk suatu kekuatan / kuasa untuk menegaskan peranan wartawan di ranah publik. Sehingga konsep Demokrasi deliberatif yang dibangun adalah sebagai upaya pembentukan kekuasaan di kalangan wartawan sendiri tanpa melibatkan institusi media di baliknya, sehingga kekuatan demokrasi oleh pekerja pers media massa sebagai kekuatan kelompok independen yang memperjuangkan suatu profesi tertentu agar tetap kembali pada praktik moralnya atau profesionalitasnya yang bukan didasarkan pada aspek kepentingan ekonomi - politik yang non legal yang dilakukan oleh pihak instansi.

Penggerakkan kelompok kecil wartawan juga menjadi bagian dari upaya revolusi perjuangan kelas, bila alat produksi menjadi milik semua maka tiap orang akan menjadi sejati, asli karena mampu menikmati hasil kerjanya. Kerja yang merupakan realisasi diri ke alam mendapatkan buah dan ekspresinya pada hasil kerja. Bila hasil kerja dimiliki si pekerja sendiri, ia tak akan tersaing. Inilah model masyarakat bahagia.

Bahasa dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan, baik itu dikuasai maupun menguasai. Seperti halnya yang dilakukan di dalam ruang publik, partisipan terlibat di dalam komunikasi yang egaliter yaitu sama-sama menjunjung diri, upaya pencapaian kebebasan dan sifat demokrasi. Egaliter dari paham egalitarianisme yang berarti kecenderungan cara berpikir bahwa penikmatan atas kesetaraan dari beberapa macam premis umum misalkan bahwa seseorang harus diperlakukan secara adil

dan mendapatkan perlakuan yang sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya.

Bahasa yang digunakan dalam perbincangan ruang publik kelompok wartawan di Kedai Kopi Perjoeangan berfungsi sebagai pengubah; karena proses-proses psikis seperti sensasi, kebutuhan dan perasaan menubuh di dalam struktur intersubjektivitas bahasa, sementara peristiwa atau pengalaman-pengalaman batin diubah menjadi muatan-muatan intensional, kognisi menjadi pernyataan, dan kebutuhan serta perasaan menjadi harapan normatif (ajaran dan nilai-nilai). Transformasi ini menghasilkan perbedaan, yang banyak sekali konsekuensinya antara subjektivitas opini, keinginan, kesenangan dan rasa sakit di satu pihak, dan ujaran serta norma yang muncul bersama klaim generalitas dipihak lain.

Bagi Habermas, sifat dasar bahasa sebagai sarana komunikasi terdapat dalam pengertian baik bahwa baik pembicara maupun pendengar suatu percakapan secara apriori berminat untuk saling memahami. Saling memahami antar pekerja pers disini berarti bahwa para pekerja pers media massa mencapai kesepakatan; kesepakatan yang mensyaratkan adanya “pengenalan antarsubjektif” terhadap keabsahan ujaran lawan bicara. Dalam proses ini masing-masing partisan akan bercermin tentang posisi mereka dalam komunikasi. Hal ini berarti bahwa struktur bahasa pada dasarnya bersifat hermeneutis atau adanya penafsiran antar subyek.

Hal-hal yang terungkap di Kedai Kopi Perjoeangan terjadi secara spontan, dan tidak teragendakan, meskipun ada diskusi yang diagendakan secara khusus non formal oleh para kelompok wartawan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedai kopi perjoeangan sebagai arena komunikasi sosial, dapat digunakan untuk menggalang opini publik. Namun opini publik yang terbangun tersebut ada yang bersifat genuine dan ada yang bersifat artifisial. Artinya, dalam warung kedai kopi perjoeangan terjadi dua bentuk komunikasi, yakni pertama, komunikasi yang bersifat rasional yang bebas dari tekanan dan pengarahan pihak-pihak tertentu, melalui diskusi yang tidak teragendakan dan komunikasi yang bersifat strategis atau manipulatif dan persuasif, melalui diskusi-diskusi yang teragendakan, yang dikesankan tanpa tekanan atau bebas dari kuasa kelompok-kelompok tertentu, namun diarahkan oleh fasilitator yang merupakan orang-orang yang dekat dengan penguasa atau tokoh-tokoh komunitas termasuk LSM yang memiliki kepentingannya sendiri.

Pemahaman tentang pandangan egaliter wartawan tersebut sebagai cara yang dilakukan di dalam membangun komunikasi di dalam ruang publik bagi kelompok pers media massa yaitu upaya pencapaian kesetaraan hak dalam berpolitik, sosial dan budayanya. Hal ini yang rupanya dicari oleh para kelompok pekerja pers media massa di Jakarta, yang dimana di dalam instansi masing-masing terdapat sekat kelas sosial. Sehingga dengan begitu, wartawan bisa berpandangan terhadap kuasa sosialnya.

Aspek yang tercakup pada kasus ini seperti pengakuan dan keberadaan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi, sehingga perlu adanya penegakan terhadap kebenaran, kemudian variabel situasi yang paling dominan disini adalah situasi terhadap masalah ketenagakerjaan yang tentu tidak lepas dari kebutuhan finansial atau penghidupan dan

keyakan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup atau tuntutan hidup pekerja dan juga menuntut adanya profesionalitas kerja atau menjalankan profesi yang terlepas dari sarat kepentingan politik berlebihan yang hanya menguntungkan sepihak, dengan menjalankan profesi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan aturan hukum dan kode etik yang berlaku. Menurut Habermas, hukum menciptakan sebuah mekanisme yang menerjemahkan kekuasaan komunikatif ke dalam kekuasaan administratif.

Peranan asosiasi profesi pada dasarnya adalah peletak pusat koordinasi kewartawanan dalam menjalankan profesinya dan juga turut membela hak-hak kebebasan pers dan juga mengatur serta membatasi kebebasan yang dianut oleh pers agar tidak keluar dari koridor yang semestinya mengacu pada keberimbangan, fakta dan tindakan kebenaran. Namun hal ini masih dinilai terlalu peranan normatif yang hanya menjaga keberadaan di pers negara tertentu contohnya di Indonesia, yang dimana peranan asosiasi hingga saat ini masih belum menyentuh persoalan kelayakan hak dan pendapat pekerja pers yang diberlakukan secara *lex spesialis*.

Kewenangan profesi bersifat otonom untuk mengatur segala bentuk kinerja pers. Namun apabila belum memiliki kajian khusus tentang hak, pendapatan dan kelayakan hidup pers dari sisi material, maka peranan Undang-undang ketenagakerjaan masih menjadi keutamaan. Hal ini yang juga menjadi pertentangan secara konflik diri, pertentangan dari aspek teoris hingga praktisnya bahwa kewenangan profesi tidak digunakan dalam menentukan nasib kewartawanan. Dimungkinkan adanya pertimbangan bahwa adanya media-media yang kemudian memilih untuk gulung tikar karena minat masyarakat terhadap media konvensional semakin berkurang. Selain itu adanya persaingan antara media online yang semakin ketat, sehingga pertimbangan terhadap ancaman investor yang memilih untuk berada di jalur bisnis yang lain bukan investasi produk media massa.

Secara prinsipil asosiasi berhak untuk memberikan usulan dan menentukan hak kelayakan pekerja pers dan juga pendapatan yang layak diperoleh. Hal ini harus didasarkan pada rapat umum, simposium dan kesepakatan diantara anggota asosiasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas kerja, *output* karya jurnalistik yang memenuhi kaidah, dan juga kepentingan demokrasi pekerja yang tidak disalahgunakan termasuk memanfaatkan hak politiknya. Perusahaan media ataupun aspirasi wartawan secara hierarkhi harus tetap menghormati peranan Asosiasi karena akses utama kepada pemerintah adalah melalui asosiasi.

Kekuasaan sosial meski memiliki kewenangan normatif, masih mengambil bentuk kehendak individu tertentu. Pekerjaan kuasa administratif, di lain pihak, dipisahkan dari kehendak atau kedaulatan individu dan dilekatkan pada aturan hukum. Sistem hukum menciptakan aturan dan kewenangan dasar yang menaungi usaha mencapai tujuan kolektif, dan memberi rakyat hak untuk boleh bertindak ketika ketentuan-ketentuan ini tidak berjalan. Akan tetapi, hukum bukanlah sekedar media untuk menerapkan kuasa administratif, namun juga

memberikan legitimasi bagi pelaksana kuasa administratif tersebut. Di bawah aspek legislatifnya hukum mengklaim merepresentasikan kepekatan yang bisa diikuti dengan bebas oleh semua orang. Kalau pada awalnya ia lebih cenderung berbentuk konsensus keyakinan agama dengan latar belakang yang tidak bisa dipertanyakan, maka di era modern mengejewantahkan diri dalam doktrin kedaulatan rakyat yang menjadi dasar lembaga-lembaga demokratis. (Heath dalam Habermas, 2016: 43). Dengan melonggarkan persyaratan kewenangan normatif untuk membiarkan berkembangnya “hukum positif” dalam kerangka proses legislasi yang legitimet dan lebih luas, maka corak hukum modern memungkinkan berkembangnya pola organisasi seperti halnya dalam keorganisasian wartawan dan regulasi sosial yang jauh lebih kompleks. Karenanya ia menampilkan sebuah kemajuan evolusioner melampaui corak kuasa politik-legal yang seragam.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan juga pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Demokrasi Deliberatif yang dibangun oleh kelompok pekerja pers adalah bentuk demokrasi bebas yang mengandalkan otonomi individu dan kelompok yang ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik yang mencakup pers dan khalayak umum ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi yang terbuka tanpa tekanan dan intervensi pihak penguasa. Dalam hal ini kelompok pekerja pers media massa mengingkingkan bahwa ada penegasan terhadap implementasi dari regulasi Undang-undang Pers dan Kode Etik sebagai dasar hukum dan aturan untuk menegakkan kebenaran yang dihasilkan oleh pers dan media massa sebagai profesionalitas kerja, pendapatan dan hak kelayakan hidup, serta perlakuan pers yang berdemokrasi tidak memihak pada kepentingan politik tertentu. Dalam mewujudkan suatu demokrasi delibertaif ini, terdapat bentuk kontaminasi pandangan pekerja sebagai gerakan komunikatif dengan didasarkan pada pandangan ideologi Marxian bahwa hak atas proletariat pekerja diwujudkan dalam kelayakan hidup dan pendapatan yang seharusnya denan cara perlawanan, membangun profesionalitas bekerja antara hak dan kewajiban, serta terbebas dari kontaminasi pandangan politik tertentu yang memberatkan atau membebani para pekerja pers lini bawah. Adapun dalam melakukan pergerakan untuk menuntut adanya hak dan juga mewujudkan diskursus pada lembaga pemerintah, merupakan suatu keputusan politis kelompok pekerja pers yang selalu terbuka bagi semua pihak.
2. Kedai Kopi Perjoeangan bukan hanya terlihat sebagai cafe penyedia bahan konsumsi biasa, melainkan Kedai Kopi Perjoeangan sebagai ruang publik adalah sebagai wahana kaum proletariat melawan kaum borjuis

dan juga penegasan dan penegakan regulasi pemerintah. Hal ini identik dengan perjuangan kelompok pekerja pers dalam menuntut hak profesionalitas sebagai jurnalis, dan penegak pandangan jurnalisme yang demokratis mengacu pada fakta dan kebenaran bukan pada kepentingan politik tertentu, kemudian menuntut adanya hak kelayakan hidup seperti pendapatan serta kapasitas beban kerja yang diberikan kepada wartawan yang sebagaimana mestinya. Selain itu Ruang Publik pada Kedai Kopi Perjoeangan mengedepankan wacana untuk mencapai opini publik. Prinsip wacana ini dijadikan sebagai landasan operasionalisasi pekerja pers dalam mewujudkan kekuatan demokrasinya dan kebebasan dalam menyampaikan gagasan-gagasan maupun opini untuk diwujudkan dalam kepentingan bersama. Penyampaian gagasan dan opini inilah yang kemudian membangun suatu pergerakan pekerja dalam menegakkan regulasi dan mengatur kembali prosedur kerja pers di lapangan serta membebaskan dari pandangan-pandangan politik pihak tertentu, kembali pada pandangan politik pekerja. Sehingga upaya untuk membangun komunikasi yang terbuka dalam aspek rasionalitas komunikasi, masih bersifat memihak pada satu sisi bukan untuk manfaat dan kepentingan terbaik bersama, sehingga dalam hal ini peneliti mengusulkan adanya ruang publik baru dan khusus yang disediakan oleh pihak pemerintah dalam menjembatani hubungan industrial antara pekerja dengan industri yang bersangkutan, sehingga profesionalitas media massa tetap terjaga dan tidak terlalu saling mendominasi yang saling merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Camus, Albert. 2017. *Seni, Politik dan Pemberontak*. Jakarta: Buku Obor.
- Camus, Albert. 2017. *Krisis Kebebasan*. Jakarta: Buku Obor.
- Camus, Albert. 2018. *Pemberontakan*. Jakarta: Buku Obor.
- Creswell, John.W., 2015. *Riset Desain Kualitatif: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dua, Michael. 2013. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Kupang: Penerbit Ledalero.
- Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Littlejoh, Stephen W., & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Habermas, Jürgen. 2004. *Krisis Legitimasi*. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Habermas, Jürgen. 2009. *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat. Vol 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habermas, Jürgen. 2010. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Hadi, Parni. 2014. *Jurnalisme Profetik*. Jakarta: Dompot Dhuafa & Insani Maksima Promosindo.

- Hardiman, Budi F., 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Hardiman, Budi F., 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Hardiman, Budi.F.,2010. *Ruang Publik (Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace)*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Hardiman, Budi F., 2010. *Seni Memahami*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Lechte, John. 2001. *50 Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Littlejoh, Stephen W., & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Press.
- McCharty, Thomas. 2003. *Teori Kritis Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusey, Michael. 2011. *Habermas (Dasar dan Konteks Pemikiran)*. Yogyakarta: Resist Book.
- West, Shane dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi.Ed.3. Buku 1 & 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Poespowardojo, Soerjanto. T. M.& Alexander Seran. 2016. *Diskursus Teori – Teori Kritis: Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Suseno, Franz Magnis. 1994. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Sugihartati, Rahma. 2018. *Membaca, Gaya Hidup dan Kapitalisme (Kajian Tentang Reading for Pleasure dari Perspektif Cultural Studies)*. Jakarta: Suluh Media.
- Suyanto, Bagong. 2017.*Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.